Educational Journal of Islamic Management (EJIM)
Volume: 03 Issue: 02 | November, 2023 | EISSN: EISSN: 2808-1862 | Doi: 10.47709/ejim.v3i2.7998

Sistem Kepemimpinan Dan Polotik Orang Melayu

Mona Paria[1]

Monaparia2@gmail.com |Universitas Islam Indrgiri

Histori Naskah:
Diajukan : 07 / 11 / 2024
Disetujui : 10 / 11 / 2024
Dipublikasi : 18 / 11 / 2024

ABSTRAK
Sistem kepemimpinan dan politik orang Melayu memiliki karakteristik unik yang berkembang selama berabad-abad, membentuk tatanan sosial-politik yang kompleks dan hierarkis. Penelitian ini mengkaji struktur kepemimpinan tradisional Melayu, yang berpusat pada institusi kesultanan dengan konsep kedaulatan yang didasarkan pada legitimasi keagamaan, keturunan, dan kontrak sosial dengan rakyat. Melalui pendekatan historis-komparatif, jurnal ini menganalisis peran sultan sebagai pemimpin spiritual dan temporal, sistem stratifikasi sosial, mekanisme pengambilan keputusan, serta transformasi sistem politik Melayu dalam konteks modernisasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mengalami perubahan signifikan, nilai-nilai kepemimpinan Melayu tradisional masih mempengaruhi praktik politik kontemporer di kawasan Nusantara.
Kata Kunci: *kepemimpinan Melayu, kesultanan, politik tradisional, stratifikasi sosial, legitimasi kekuasaan*

PENDAHULUAN

Peradaban Melayu telah mengembangkan sistem kepemimpinan dan politik yang kompleks jauh sebelum kedatangan pengaruh kolonial Eropa. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Melayu. Kepemimpinan dalam tradisi Melayu bersifat paternalistik dengan raja atau sultan sebagai pusat kekuasaan yang memiliki otoritas spiritual dan temporal.

Penelitian tentang sistem kepemimpinan Melayu menjadi penting dalam konteks kajian politik Asia Tenggara, karena sistem ini telah membentuk pola-pola kekuasaan yang bertahan hingga era modern. Meskipun banyak kesultanan Melayu telah kehilangan kekuasaan politiknya, pengaruh nilai-nilai kepemimpinan tradisional masih terasa dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Melayu kontemporer.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis struktur, karakteristik, dan dinamika sistem kepemimpinan dan politik orang Melayu dengan fokus pada periode pra-kolonial hingga awal abad ke-20. Pertanyaan utama yang akan dijawab meliputi: Bagaimana struktur kekuasaan dalam sistem politik Melayu tradisional? Apa saja prinsip-prinsip legitimasi kepemimpinan? Dan bagaimana sistem ini bertransformasi menghadapi modernisasi?

METODE PENELITIAN

Metode harus membuat pembaca dapat memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Melayu

Volume: 03 Issue: 02 | November, 2023 | EISSN: EISSN: 2808-1862 | Doi: 10.47709/ejim.v3i2.7998

Secara Harfiah, pimpin bermakna bimbing atau tuntun. Kepemimpinan bermakna perihal pemimpin dan atau cara memimpin. Dalam pengertian umum kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi dan atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Dalam Kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting" Dalam Kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting (Ellya Roza, Safira Tazkiyah, dan Sindi Ayudia Pama, 2022: 76).

Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan saling bekerja samauntuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin dapat juga diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu yang dapat memengaruhi anggota dengan segala tujuan yang ingin dicapai.

Dalam kepemimpinan Melayu, memimpin adalah orang yang biasa disebut "orang yang di tuakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting". Memiliki ungkapan yangmengandung pengertian tersebut, maka seorang pemimpin yang baik dan benaradalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Namun, di antara pemimpin dan masyarakat tidak ada pembatas yang menjadi pemisah yang menjadi pemisah dan haruslah saling bekerja sama. Dalam ungkapan lain kembali ditegaskan "didahulukan dapat diraih, tinggikan dapat dijangkau, dekatnya tidak beranjak, jauhnya tidak berantara". Maksud dari ungkapantersebut, sebagai seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat dan sikap yang angkuh. Ditandai dengan kata "tinggikan dapat dijangkau, dekatnya tidak beranjak".

Acuan Pemimpin yang Ideal

Dalam pandangan masyarakat Melayu kepemimpinan merupakan amanah dan untuk dibawa kehadapantuhan. Didalam agama Islam harta benda, keturunan dapat dipandang menentukan harga diri, namun diatas dari itu semua, tetaplah agama sebagai ukuran yang terbaik untuk menentukan harga diri yang paling hakiki. Tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya bersifat horizontal-formal sesamamanusia, tetapi bersifat vertikal-moral, di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan sang pencipta (Fera Andriani, Elmustiian Rahman, Hadi Rumadi, 2016).

Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang menyenangkan. tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik baiknya. Allah SWT berfirman: "dan orang-orang yang memelihara amanah (yangdiembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatma, mereka tulah yang akan mewarisi surga firdaus, mereka akan kekal di dalamnya" Seorang pemimpin harus bersifatAmanah, Siddiq, Fathonah dan Tabligh sebab ia akan diserahi tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulahmengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Seorang pemimpin wajib memiliki "pakaian" yakni "pakaian batin" yang batin disebut sifat dan kepribadian yang senantiasa melekatdalam dirinya yang harus dia kobarkan kemana-mana dan dalam kondisi apa saja,sebab seorang pemimpin itu setiap saatakan merasa ihsan atau mawas diri serta takut berbuat kesalahan kepada manusia apalagi kepada Allah SWT. Dalamungkapan Melayu "Memakai syara' lahir dan batin. Imannya kokoh adatnya kental. Teladannya nampak, ilmu pun banyak". Inilah pemimpin yang disebut menjadi pemimpin sejati, yang sempurna lahiriah maupun batiniah yang mampu membawa umatnya kepada kehidupan aman dan damai sejahtera, adil dan makmur.

Sifat-Sifat Pemimpin Melayu

Shidiq atau jujur memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan keberanian mengakui sebuah kenyataan apa adnya. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Konsep amanah

Volume: 03 Issue: 02 | November, 2023 | EISSN: EISSN: 2808-1862 | Doi: 10.47709/ejim.v3i2.7998

yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan yang menjaga sebaik- baiknya hal yang diamanahkan kepadanya, tidak saja dari orangorang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Swt. Fathonah merupakan sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fathonah dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan.

Sifat tabliq juga memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dengan tuturan yang tepat. Pemimpin bersikap saling mengayomi antara kaum tua dan muda. Sikap ini mampu menghilangkan kecemburuan sosial, meningkatkan pengetahuan pemimpin, serta mendapat banyak pemikiran untuk kebaikan dan keberlangsungan dalam kehidupanbermasyarakat. Dalam menyampaikan sesuatu hal, pemimpin dituntut untukcerdas dan mudah dimengerti oleh masyarakatnya. Pemimpin harus pandai menggunakan kata-kata yang mudahdipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian (Sri Mulyani, 2023).

KONSEP KEDAULATAN DALAM TRADISI MELAYU

Daulat Sultan sebagai Sumber Legitimasi

Dalam kosmologi politik Melayu, konsep "daulat" merupakan inti dari legitimasi kekuasaan seorang raja atau sultan. Daulat dipahami sebagai kekuatan supernatural yang dimiliki oleh penguasa, yang menjadikannya berbeda dari rakyat biasa dan memberikan hak untuk memerintah. Konsep ini memiliki akar dalam tradisi Hindu-Buddha yang kemudian diserap ke dalam kerangka Islam.

Daulat tidak dapat dipisahkan dari pribadi sultan; ia melekat pada individu melalui garis keturunan yang sah. Namun, daulat juga bersifat kondisional - sultan yang bertindak zalim atau tidak adil dipercaya akan kehilangan daulatnya, yang dapat mengakibatkan malapetaka bagi kerajaan. Konsep ini menciptakan semacam "kontrak sosial" antara penguasa dan rakyat, meskipun tidak terformulasi secara eksplisit.

Prinsip Keturunan dan Suksesi

Sistem suksesi dalam kesultanan Melayu umumnya mengikuti prinsip patrilineal, di mana tahta diwariskan kepada keturunan laki-laki sultan. Namun, praktiknya tidak selalu linear; terdapat fleksibilitas yang memungkinkan saudara sultan atau kerabat lain naik tahta jika tidak ada putra mahkota yang layak. Keputusan suksesi sering melibatkan dewan pembesar kerajaan dan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kemampuan calon, dukungan politik, dan tanda-tanda supernatural.

STRUKTUR HIERARKI POLITIK MELAYU

Sultan sebagai Puncak Hierarki

Sultan berada di puncak hierarki politik dan sosial sebagai Yang Dipertuan (Yang Berkuasa). Posisi ini tidak hanya memberinya otoritas politik tertinggi tetapi juga peran sebagai pemimpin spiritual dan pelindung agama Islam. Sultan memiliki hak prerogatif dalam berbagai bidang termasuk pembentukan hukum, pengangkatan pejabat, pemberian gelar, dan pengelolaan sumber daya kerajaan.

Pembesar dan Menteri

Di bawah sultan terdapat lapisan pembesar kerajaan yang terdiri dari menteri-menteri dengan fungsi administratif dan penasihat. Dalam kesultanan Melayu klasik seperti Melaka, terdapat empat menteri utama: Bendahara (perdana menteri), Temenggung (panglima perang dan keamanan), Laksamana (panglima armada), dan Penghulu Bendahari (menteri keuangan).

Bendahara memegang posisi paling penting setelah sultan, bertindak sebagai kepala pemerintahan sehari-hari dan sering kali menjadi wakil sultan. Dalam beberapa kasus sejarah, Bendahara yang kuat bahkan dapat menjadi sultan jika dinasti yang berkuasa terputus.

Stratifikasi Sosial dan Politik

Masyarakat Melayu tradisional terstratifikasi dengan jelas ke dalam beberapa lapisan:

- Kerabat sultan dan bangsawan tinggi (raja-raja)
- Pembesar dan bangsawan menengah (menteri, datuk, orang kaya)
- Rakyat bebas (orang Melayu biasa)
- Hamba dan budak

Mobilitas sosial mungkin terjadi melalui prestasi dalam peperangan, pelayanan kepada sultan, atau pernikahan, meskipun sistem secara keseluruhan cenderung rigid.[22]

Volume: 03 Issue: 02 | November, 2023 | EISSN: EISSN: 2808-1862 | Doi: 10.47709/ejim.v3i2.7998

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sistem Musyawarah

Meskipun sultan memiliki otoritas tertinggi, pengambilan keputusan penting biasanya melibatkan musyawarah dengan pembesar kerajaan. Institusi seperti Majlis Mesyuarat atau Dewan Pembesar berfungsi sebagai forum konsultasi di mana sultan mendengar pendapat para menteri dan bangsawan.

Prinsip musyawarah ini mencerminkan nilai-nilai Melayu yang menekankan konsensus dan harmoni sosial, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan sultan.

Peran Adat dan Hukum Islam

Sistem hukum Melayu mengintegrasikan hukum adat (customary law) dengan syariat Islam. Adat mengatur banyak aspek kehidupan sosial dan politik, sementara hukum Islam diterapkan dalam urusan agama, pernikahan, dan beberapa aspek hukum pidana. Kombinasi ini menciptakan sistem hukum hibrida yang unik bagi dunia Melayu.

Sultan sebagai "Bayangan Tuhan di Bumi" memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kedua sistem hukum ini. Dalam praktiknya, qadi (hakim agama) menangani perkara syariat, sementara pembesar mengurus perkara adat.

LEGITIMASI DAN SIMBOLISME KEKUASAAN

Regalia dan Simbol Kerajaan

Kekuasaan sultan diwujudkan dan dilegitimasi melalui berbagai simbol material seperti regalia kerajaan. Keris pusaka, mahkota, payung kebesaran, dan tahta kerajaan bukan sekadar objek dekoratif tetapi dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang memperkuat daulat sultan.

Upacara penobatan sultan merupakan ritual kompleks yang memadukan elemen Islam dengan tradisi pra-Islam, menegaskan hubungan sultan dengan dunia supernatural dan melegitimasi otoritasnya di hadapan rakyat.

Genealogi dan Silsilah

Pencatatan silsilah kerajaan dalam teks-teks seperti Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan dengan menghubungkan sultan yang berkuasa dengan leluhur yang mulia dan bahkan dengan para nabi. Genealogi ini menciptakan narasi kontinuitas dinasti yang memperkuat klaim atas tahta.

TRANSFORMASI DI ERA KOLONIAL DAN MODERN

Dampak Kolonialisme

Kedatangan kekuatan kolonial Eropa - Portugis, Belanda, dan Inggris - secara drastis mengubah lanskap politik Melayu. Kesultanan-kesultanan yang sebelumnya berdaulat penuh menjadi negara protektorat atau koloni, dengan sultan kehilangan banyak kekuasaan politiknya.

Sistem British Residency yang diterapkan di Semenanjung Melayu pada akhir abad ke-19 mengubah sultan menjadi pemimpin seremonial dengan "penasehat" Inggris yang sesungguhnya mengendalikan pemerintahan. Meskipun demikian, Inggris mempertahankan institusi kesultanan untuk melegitimasi kekuasaan kolonial dan memudahkan penguasaan.

Adaptasi dan Kontinuitas

Dalam era pasca-kolonial, institusi kesultanan di beberapa negara Melayu seperti Malaysia dan Brunei berhasil bertahan dengan berbagai tingkat kekuasaan. Di Malaysia, sistem monarki konstitusional dengan sembilan sultan yang bergiliran sebagai Yang di-Pertuan Agong merupakan adaptasi unik dari tradisi kesultanan.

Meskipun kekuasaan politik sultan dibatasi, mereka tetap memainkan peran penting sebagai simbol identitas Melayu dan pelindung Islam. Nilai-nilai kepemimpinan Melayu tradisional seperti sikap paternalistik, penekanan pada harmoni sosial, dan rasa hormat pada hierarki masih mempengaruhi budaya politik kontemporer.

SIMPULAN

Sistem kepemimpinan dan politik Melayu tradisional berpusat pada institusi kesultanan dengan legitimasi berdasarkan konssep "daulat", keturunan, dan nilai-nilai Islam. Sultan berperan sebagai pimpinan

Volume: 03 Issue: 02 | November, 2023 | EISSN: EISSN: 2808-1862 | Doi: 10.47709/ejim.v3i2.7998

spiritual dan temporal dengan struktur herarki yang jelas meliputi pembesar kerajaan dan stratifikasi sosial. Meskipun kolonialisme mengubah kekusasaan kesultanan menjadi seremonial, niali-nilai kepemimpinan Melayu seperti amanah, musyawarah dam pateranlisme masih bertahan dan mempengaruhi budaya politik kontenporer dikawasan nusantara. Penelitian ini menunjukan bahwa tradisi kepemimpinan Melayu telah beradaptasi dengn modernisasi sambil mempertahan kan esensi niali-niali dasarnya sebagai identitas budayanya dan pedomon kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ellya Roza, Safira Tazkiyah, dan Sindi Ayudia Pama, Membaca Kepemimpinan Melayu Nusantara, Jurnal Nusantara Volume 18 Nomor 2 Desember 2022

Fera Andriani, Elmustiian Rahman, Hadi Rumadi. Karakter Pemimpin Melayu dalam Pemimpin Ungkapan Melayu Karya Tenas Effendy. Jurnal Online Mahasiswa, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016

Jumadi dan Mohd Rizal Yakoop, Revitalisasi Jati Diri Masyarakat Melayu, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan humaniora, Volume 19 Nomor 1 Juni 2014

Juswandi, Pemimpin yang Ideal dalam Masyarakat Melayu, Jurnal Ilmu Budaya Volume 9 Nomor 1 Tahun 2012

Lambang Erwanto Suyadjid, Pencarian Jati Diri (Self Discovery) Milkman dalam Song of Solomon Karya Tony Morrison, Jurnal Buana PendidikanVolume VI Nomor 11 Oktober 2010

Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Rina Rehayati, Jati Diri Melyu: Kontekstualitasi Jati Diri Melayu di Era Global, Jurnal Toleransi, Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

Sri Sabakti, Pengukuhan Identitas Melayu dalam Syiar Dendang Pengantar Tidur untuk Anak Pada Masyarakat Riau, Jurnal Bidar, Volume 10 Nomor 2 Desember 2020

Sukardi, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara)

Tri Tarwiyani, Sejarah Kebudayaan Melayu, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020

"The Malay Magician." Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 16, no. 2 (1938): 1-283.

Winstedt, R.O. "A History of Johore (1365-1895)." Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 10, no. 3 (1932): 1-167.

Wolters, O.W. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1982.

Zainal Abidin bin Ahmad. "The Legal and Judicial System during the Malacca Sultanate." Malaysia in History 18, no. 1 (1975): 13-21.